

DAFTAR PUSTAKA

- ACLK KPK. (2023, February 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*. Aclc.Kpk.Go.Id. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Algam, G. S. (2018). Hermeneutika Gadamerian Untuk Memahami Kualitas Audit (Pemeriksaan Keuangan) BPK RI. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 5(1), 31–45.
- Arens, A. A., Beasley, M. S., Elder, R. J., & Hogan, C. E. (2016). *Auditing and Assurance Services, eBook, Global Edition*. Pearson Education. <https://books.google.co.id/books?id=cWYIDAAAQBAJ>
- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa audit & assurance: pendekatan terpadu (adaptasi Indonesia) - Auditing and assurance services : an integrated approach an Indonesian adaptation Buku 1*. Salemba Empat.
- Atyanta, R. (2011). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten X di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, 1(1), 16.
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit WTP di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22–33.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. In *BPK* (1).
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). *LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2020*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2021*.

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2022). *LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2022*.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023). *LHP Atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023*.
- Badan Pusat Statistik. (2024, July 15). *Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2024 sebesar 3,85, menurun dibandingkan IPAK 2023*. BPS.
- Badudu, Y. (2003). *Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. <https://books.google.co.id/books?id=wxLhS0YVe8UC>
- BBC. (2024, May 24). *Kasus SYL: Penyalahgunaan dana operasi menteri dan pemerasan bawahan menjadi 'rahasia umum' - Mengapa anak buah memilih bungkam?* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gqelnpvryo>
- Bergman, M., & Lane, J.-E. (1990). Public policy in a principal-agent framework. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. thousand oaks, ca: Sage London.
- Damanik, S., & Shauki, E. R. (2019). Analisis opini laporan hasil pemeriksaan bpk ri (studi pada badan keamanan laut ri). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 385–402.
- Effendy, Y. (2011). KAJIAN HASIL PEMERIKSAAN BPK OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMDA. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 11(1).
- Fitri, W. (2024). Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 2681–2689. <https://doi.org/10.37385/msej.v5i1.4369>

Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.

Hamdani. (2024). *Pengauditan Keuangan Negara* (D. Apriliyani, Ed.; 1st ed.). RAJAWALI PERS.

Haryatmoko. (2011). *Etika Publik: untuk integritas pejabat publik dan politisi*. GramediaPustakaUtama.

Hoesada, J. (2022). *Teori Akuntansi: dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Penerbit Andi.

Huntington, S. P. (1969). *Political Order in Changing Societies*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:145451884>

Ikatan Akuntansi Indonesia. (2001). *SA Seksi 508 Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Auditan*.

International Accounting Standards Board. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*.

International Auditing and Assurance Standar Board. (2009). *INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 200 OVERALL OBJECTIVES OF THE INDEPENDENT AUDITOR AND THE CONDUCT OF AN AUDIT IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING*.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.

Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 13–26.

Klitgaard, R. (1998). *Membasmi Korupsi*. Yayasan Obor Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=RHzHy4PPGoMC>

- Kompas. (2023, November 10). *Daftar Anggota Kabinet Jokowi yang Terjerat Korupsi: 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri* Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Daftar Anggota Kabinet Jokowi yang Terjerat Korupsi: 6 Menteri dan 1 Wakil Menteri. Kompas.Com.
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Kencana.
<https://books.google.co.id/books?id=gI9ADwAAQBAJ>
- Kusmarni, Y. (2012). STUDI KASUS (John W. Creswell). *UGM Jurnal Edu UGM Press*, 2, 1–12.
- Milal, A. Z. (2013). Makna Opini Audit Wtp Bagi Kementerian/Lembaga (Studi Kasus Pada Kementerian Sosial). *Universitas Brawijaya. Malang*.
- Mulyadi. (2023). *Sistem Akuntansi, Edisi 4*. Penerbit Salemba.
<https://books.google.co.id/books?id=f4ncEAAAQBAJ>
- Musa, A. N. (2015). Kajian Hukum Atas Opini BPK RI Terhadap Laporan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat). *Lex et Societatis*, 3(2).
- Nasution, M. Y. P., Tinangon, J. J., & Elim, I. (2014). RISIKO PEMERIKSAAN HUBUNGANNYA DENGAN DETEKSI KECURANGAN DALAM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. *Jurnal EMBA*, 2.
- Nye, J. S. (1967). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. *American Political Science Review*, 61(2), 417–427. <https://doi.org/DOI:10.2307/1953254>
- Paeh, K. A. (2017). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Hubungan Dengan Unsur Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Katalogis*, 5(2).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN*.

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2024). *Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Jkt.Pst.*
- Putro, S. H., Mollet, J. A., & Klara, A. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI OPINI HASI PEMERIKSAAN BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA LIMA WILAYAH ADAT PAPUA.*
- Rampeengan, M. C. (2013). Fungsi laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa keuangan dalam kasus tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 2(2).
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. In *Republik Indonesia* (20).
- Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.*
- Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara* (15).
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan* (15).
- Republik Indonesia. (2023). *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA* (1).
- Rosidawati, C., & Mulyani, S. (2013). STUDI: LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (MENGUNAKAN CONTENT ANALYSIS). *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–14.
- Salle, A. (2019). Penyalahgunaan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Daerah: Fakta Nyata Dari Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4, 1–14.

- Sipahutar, H. (2013). *Analisis Perubahan Opini LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Tarigan, A. (2019). NILAI PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DIBUAT OLEH INSPEKTORAT DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSANAAN NEGERI ROKAN HILIR. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 2(2), 248–263.
- Umar, H. (2016). *Corruption the devil*. Penerbit Universitas Trisakti. <https://books.google.co.id/books?id=gOn-nQAACAAJ>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91.
- Yunawati, S. (2022). Analisis opini BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 11(1), 14–21.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C>
- Zimmerman, J. L. (1977). The municipal accounting maze: An analysis of political incentives. *Journal of Accounting Research*, 107–144.